NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster
p-ISSN: 2964-8165, e-ISSN: 2964-8157
Vol. 4 No. 1, January - June 2025
https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/nidhomiya

Pemberdayaan UMKM Berbasis Dana Infaq: Model Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Ponorogo dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Umat

Naluri Sari Amalia[1], Said Abadi[2]
[1]UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, amalianaluri@gmail.com
[2] UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia, abadi@iainponorogo.ac.id

Article Info

Article history:
Received May 11, 2025
Revised June 20, 2025
Accepted June 24, 2025
Available online June 27, 2025

*Corresponding author email:
amalianaluri@gmail.com

Keywords:
community empowerment, MSME, ummah-based economy

Abstract

This study aims to analyze the empowerment of MSMEs through economic programs aimed at improving the well-being of the Muslim community, conducted by Lembaga Manajemen Infaq (LMI) in Ponorogo. It also identifies the obstacles faced during this empowerment process and evaluates its overall impact. LMI strives to help mustahik become productive entrepreneurs, but MSME empowerment efforts face challenges. The research applies to a qualitative descriptive method, collecting data through interviews with LMI staff and MSME actors, as well as observations and documentation. The data is analyzed by organizing the information, presenting the results, and drawing conclusions. The findings indicate that MSME empowerment by LMI Ponorogo is implemented through business capital assistance, training in using social media for marketing, packaging design, and obtaining halal certifications. The main constraints for LMI are its limited human resources and expertise in supporting MSMEs' development. Meanwhile, MSME actors face a lack of skills, capital, marketing experience, and technological knowledge. To overcome these challenges, LMI collaborates with external parties that have relevant expertise. As a result, the initiative has increased income, created jobs, and strengthened business growth. However, MSME actors still

struggle with market access and using technology effectively to expand their businesses.

DOI: 10.21154/nidhomiya.v4i1.4577
Page: 1-11

Nidhomiya with CC by license. Copyright ©2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang kompleks dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, sering kali ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan. Kondisi kemiskinan sering kali dipicu oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang kurang memadai, terbatasnya kesempatan kerja, serta kurangnya motivasi dan kesadaran untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri dapat muncul akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih berkaitan dengan sumber daya manusia. Sedangkan, faktor eksternal melibatkan kondisi yang lebih kompleks dimana berbagai elemen saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas program, penting untuk memperhatikan kedua unsur tersebut secara bersamaan (Sukesi, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 tercatat sebesar 83,71 ribu orang. Angka ini menurun sebanyak 3,66 ribu orang pada tahun 2024, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 80,05 ribu orang. Sementara itu, nilai garis kemiskinan di Kabupaten Ponorogo juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, garis kemiskinan berada di angka Rp395.069,00 per kapita per bulan, dan naik sebesar 4,70% atau Rp18.550,00. Dengan demikian, garis kemiskinan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 menjadi Rp413.619,00 per kapita per bulan (BPS Kabupaten Ponorogo, 2024).

Maka penanggulangan kemiskinan tersebut membutuhkan proses yang panjang dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mempercepat pencapaian sasaran program penanggulangan kemiskinan yaitu dengan cara meningkatkan pemberdayaan di tingkat masyarakat yang kurang mampu (Setiadi, 2020). Pemberdayaan UMKM sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. UMKM sebagai komponen yang sangat penting dalam pembangunan, khususnya dalam perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha serta dapat mengatasi kemiskinan (Hertina dkk., 2024). Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mendorong ekonomi masyarakat agar dapat mencapai hasil yang optimal, khususnya untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan untuk meningkatkan perekonomian umat (Bustami, 2015).

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan lembaga filantropi profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dhuafa yakni masyarakat yang kurang mampu, dengan mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat serta dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) perusahaan. Lembaga

Manajemen Infaq berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Sebagai organisasi nonprofit, LMI fokus terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dana ZIS yang kemudian di terapkan dalam berbagai program yang ada di LMI, antara lain program ekonomi, program pendidikan, program dakwah, program kemanusiaan, program kesehatan (Rois, 2024).

Program ekonomi di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo ada dua pendekatan, antara lain pendekatan *charity* dan pemberdayaan. Pendekatan *charity* (konsumtif) bertujuan untuk melanjutkan kehidupan, sedangkan pendekatan pemberdayaan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi, pemberdayaan di LMI Ponorogo, yaitu melalui program peningkatan pendapatan masyarakat, contohnya yaitu permodalan usaha, *upgrading skill*, vokasi (pengurusan legalitas, proses pendampingan izin usaha). Sedangkan, pendekatan pemberdayaan di LMI Ponorogo dibagi menjadi dua, yaitu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUBe (Kelompok Usaha Bersama) (Subakti, 2025).

LMI Ponorogo berusaha membantu mustahik untuk menjadi produktif, maka salah satu program di LMI Ponorogo, yaitu program ekonomi yang bertujuan agar mustahik menjadi produktif dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Namun, dalam pemberdayaan UMKM melalui program ekonomi di LMI Ponorogo masih terdapat kendala, seperti terbatasnya pendampingan manajerial, rendahnya konsistensi pelaku usaha, persaingan pasar yang semakin ketat, kurangnya inovasi produk, dan manajemen usaha yang belum optimal juga menghambat daya saing UMKM. Selain itu, minimnya pelatihan digital marketing membuat UMKM kesulitan memanfaatkan teknologi untuk memperluas pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program ekonomi di LMI Ponorogo mampu meningkatkan kapasitas UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Jl. Semeru No. 53 Nologaten Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti mengambil penelitian di lokasi tersebut karena pentingnya peran LMI Ponorogo dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS secara produktif yang digunakan untuk pemberdayaan UMKM sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian umat. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara kepada staf di LMI Ponorogo dan pelaku UMKM penerima bantuan modal usaha, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu *data collection* (pengumpulan data) diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lingkungan LMI Ponorogo. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan rumusan masalah *(reduction data)*. *Data display* (penyajian data) dilakukan dari data yang sudah terkumpul dari LMI Ponorogo dan pelaku UMKM, selanjutnya diuraikan menjadi narasi yang berkesinambungan dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai melalui beberapa faktor, yaitu penguatan faktor produksi, penguasaan pemasaran, pendapatan yang memadai, dan kepemilikan informasi (Chusniah, 2023). Faktor produksi dalam suatu usaha menekankan terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi sehingga dapat memperkuat faktor utama, yaitu tenaga kerja, modal, kewirausahaan, dan sumber daya manusia. Pada penelitian ini, strategi LMI Ponorogo sejalan dengan teori tersebut dengan memperkuat tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan (*upgrading skill*) serta memperkuat modal melalui penyediaan alat produksi sesuai kebutuhan UMKM. Peningkatan keterampilan memungkinkan pelaku usaha bekerja lebih efisien dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas, terbukti dengan berkurangnya waktu produksi hingga 50%. Sementara itu, penyediaan alat produksi dapat membantu menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing produk.

Faktor produksi dalam aspek kewirausahaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan tenaga kerja dan modal. Kendala utama bagi pelaku usaha bukan hanya terhadap modal, bahan baku, atau peralatan, tetapi juga kurangnya keberanian dalam mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, LMI Ponorogo mengarahkan pelaku usaha ke lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk memberikan akses permodalan tetapi sebagai bentuk pendampingan bisnis dan motivasi agar mereka lebih percaya diri dalam memperluas usaha. Pemberdayaan di LMI Ponorogo menunjukkan hampir 80% pelaku UMKM mengalami peningkatan pendapatan, meskipun akses mereka ke pasar modal belum diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, pemberdayaan di LMI Ponorogo terhadap penguatan faktor produksi mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku UMKM, sesuai dengan konsep dalam teori faktor produksi.

Penguasaan pemasaran menekankan pentingnya pemahaman dan penguasaan strategi pemasaran yang efektif agar suatu produk dapat bersaing di pasar. Dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh LMI Ponorogo mencerminkan penerapan penguasaan pemasaran dengan pelaku UMKM dapat membantu mengakses pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart melalui standarisasi kemasan, sertifikasi halal, dan uji produk. Upaya ini menunjukkan bahwa pemasaran yang berhasil tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kesesuaian dengan standar yang diterapkan oleh pasar sasaran.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing, LMI Ponorogo melakukan *upgrading packaging* dan standarisasi produk dalam pemasaran. Kemasan yang lebih menarik dan standar produk yang lebih baik akan meningkatkan persepsi nilai di mata konsumen, sehingga produk lebih kompetitif di pasar. Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Ponorogo juga telah melakukan pelatihan pemasaran digital melalui *Google Business* dan *WhatsApp Business*. Namun, pelaku UMKM masih mengandalkan pemasaran tradisional dengan sistem "*gethok tular*," yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital masih menjadi tantangan. Maka, perubahan pemasaran dari tradisional ke digital membutuhkan edukasi dan adaptasi yang berkelanjutan agar pelaku usaha dapat lebih efektif dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Pendapatan yang memadai menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh individu atau kelompok harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung

kesejahteraan yang berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi di LMI Ponorogo mencerminkan konsep tersebut dengan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM, baik secara material maupun spiritual. Berdasarkan survei kaji dampak menunjukkan keberhasilan program dapat diukur melalui peningkatan desil ekonomi penerima manfaat, dimana kenaikan minimal satu desil yang menandakan adanya perbaikan dalam taraf hidup mereka.

Pendekatan yang diterapkan LMI Ponorogo selaras dengan teori pendapatan berkelanjutan, yang menekankan peningkatan pendapatan jangka panjang dapat melalui pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkelanjutan. Strategi ini memastikan stabilitas ekonomi mustahik dengan menjamin kualitas produk serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar. Faktor eksternal seperti perubahan ekonomi global juga diperhitungkan dalam strategi adaptasi UMKM. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis pendampingan dan adaptasi pasar mampu menciptakan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Sedangkan, kepemilikan informasi menunjukkan akses terhadap informasi yang memadai sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi yang optimal. Informasi yang akurat dan relevan memungkinkan individu atau kelompok untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko bisnis, dan memanfaatkan peluang pasar dengan lebih baik. Dalam penelitian ini, LMI Ponorogo memastikan bahwa penerima modal usaha memiliki akses informasi yang cukup melalui pendampingan rutin dan pelatihan akuntansi dasar. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi bisnis dan keuangan, sehingga pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Kepemilikan informasi yang semakin banyak informasi yang dimiliki seseorang, maka semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing.

Meskipun mayoritas pelaku UMKM di LMI Ponorogo sudah melek teknologi, tantangan tetap ada bagi mereka yang kurang siap beradaptasi dengan perkembangan digital. Oleh karena itu, pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran, manajemen keuangan, dan pengembangan usaha. Penelitian ini menunjukkan strategi LMI Ponorogo dalam memastikan kepemilikan informasi bagi pelaku UMKM sejalan dengan teori kepemilikan informasi, yang berkontribusi pada peningkatan literasi usaha, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi di tengah dinamika pasar.

Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM melalui program ekonomi di LMI Ponorogo meliputi terbatasnya SDM yang dimiliki LMI Ponorogo, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan UMKM. Sedangkan kendala yang dihadapi pelaku UMKM yaitu terbatasnya pendampingan manajerial, rendahnya konsistensi pelaku usaha, persaingan pasar yang semakin ketat, kurangnya inovasi produk, dan manajemen usaha yang belum optimal juga menghambat daya saing UMKM. Selain itu, minimnya pelatihan digital marketing membuat UMKM kesulitan memanfaatkan teknologi untuk memperluas pemasaran.

Permasalahan internal yang dihadapi oleh UMKM yaitu rendahnya profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha, keterbatasan permodalan serta akses

terhadap perbankan atau bank, dan rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi (Setiawan dkk., 2022). Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha sering dikaitkan dengan keterbatasan keterampilan, kurangnya inovasi, serta rendahnya adaptasi terhadap perubahan bisnis. Dalam penelitian ini, UMKM binaan LMI Ponorogo terlihat dalam keterampilan pengelolaan usaha para pelaku UMKM umumnya sudah ada sebelum bergabung dalam program pendampingan. Namun, keterampilan ini bersifat statis karena tidak disertai dengan peningkatan yang berkelanjutan. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya keterampilan adalah usia pelaku usaha yang rata-rata sudah lanjut dan kurang berani melakukan ekspansi.

Profesionalisme dalam usaha tidak hanya bergantung pada keterampilan awal, tetapi juga pada keberanian mengambil risiko dan fleksibilitas dalam beradaptasi. Selain itu, kendala utama yang dihadapi pelaku usaha adalah pemasaran, karena mayoritas masih mengandalkan metode *offline* dan kurang memanfaatkan teknologi secara optimal. Rendahnya literasi digital ini berakibat pada keterbatasan jangkauan pasar dan daya saing produk. Untuk mengatasi permasalahan ini, LMI Ponorogo menyediakan pelatihan pemasaran digital melalui *WhatsApp Business* dan *Google Business* yang berdampak pada peningkatan produksi, penghasilan, serta penerimaan produk. Langkah ini menunjukkan bahwa dengan intervensi yang tepat, maka profesionalisme sumber daya manusia dapat ditingkatkan, terutama dalam aspek digitalisasi usaha, sehingga pelaku UMKM mampu mengembangkan bisnisnya secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Keterbatasan permodalan serta akses terhadap perbankan dan pasar merupakan tantangan utama bagi UMKM yang berdampak langsung pada kapasitas produksi dan daya saing usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, LMI Ponorogo menerapkan mekanisme pendataan, *assessment* kelayakan usaha, dan intervensi berupa bantuan alat atau pelatihan. Namun, rendahnya literasi keuangan menjadi kendala utama, sehingga banyak pelaku usaha kesulitan mengakses pendanaan formal dari perbankan. Selain itu, persaingan pasar yang ketat semakin memperburuk kondisi, terutama bagi UMKM yang masih mengandalkan pemasaran konvensional. Strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini mencakup peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta digitalisasi melalui *e-commerce* dan media sosial, sehingga UMKM dapat lebih mandiri dalam mengakses modal dan memperluas pasar.

Rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi sering dikaitkan dengan keterbatasan literasi digital, akses terhadap infrastruktur teknologi, serta kesiapan individu dalam perubahan. Dalam konteks penelitian UMKM binaan LMI Ponorogo, keterbatasan teknologi terbukti menghambat efisiensi, pemasaran, dan inovasi usaha. Meskipun telah disediakan pelatihan seperti *WhatsApp Business* dan *Google Business*, penerapannya masih terbatas karena faktor usia dan rendahnya pemahaman teknologi. Hal ini sejalan dengan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman pengguna.

Sedangkan, permasalahan eksternal yang dihadapi oleh UMKM, seperti iklim usaha yang kurang mendukung pengembangan usaha kecil, kebijakan pemerintah yang tidak

berpihak bagi pengembangan usaha kecil, dan kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan manajemen (Setiawan dkk., 2022). Tantangan utama yang dihadapi UMKM, yakni keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan mahalnya biaya teknologi, semakin memperlambat transformasi digital dalam usaha mereka. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, seperti pelatihan berbasis praktik, pendampingan intensif, serta subsidi atau insentif untuk investasi teknologi, agar UMKM lebih siap dalam memanfaatkan teknologi guna meningkatkan daya saing mereka.

Iklim usaha yang kurang mendukung sering kali menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha kecil, terutama karena faktor seperti keterbatasan akses permodalan, infrastruktur yang kurang memadai, serta persaingan pasar yang ketat. Dalam penelitian ini, UMKM binaan LMI Ponorogo melakukan *assessment* dengan menggunakan metode *Logical Framework Analysis* (LFA) dan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) yang menunjukkan bahwa kondisi eksternal sangat mempengaruhi perkembangan UMKM. Teori mengenai iklim usaha menyatakan bahwa faktor ekonomi, regulasi, dan lingkungan bisnis berperan besar dalam menentukan keberlanjutan usaha.

Keterbatasan akses permodalan dapat menghambat ekspansi usaha dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti transportasi dan jaringan internet, membatasi jangkauan pasar dan efisiensi produksi. Selain itu, persaingan pasar yang ketat semakin memperumit posisi UMKM untuk bertahan dan berkembang. Maka, LMI Ponorogo menerapkan strategi intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM berdasarkan hasil *assessment* sehingga solusi yang diberikan lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan teori bahwa dukungan eksternal yang terarah, seperti fasilitasi akses modal, penguatan infrastruktur, dan peningkatan daya saing melalui pendampingan, dapat membantu UMKM mengatasi hambatan dalam lingkungan usaha yang kurang kondusif.

Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada usaha kecil menekankan terdapat dukungan formal, implementasi kebijakan sering kali tidak efektif dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM. Pemerintah telah menyediakan berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), insentif pajak, serta pelatihan dan pendampingan usaha. Namun, tantangan utama tetap ada, terutama dalam akses pembiayaan yang belum merata dan persaingan dengan produk impor yang lebih murah. Kebijakan publik menunjukkan kebijakan yang kompleks dan sulit diakses sering kali menghambat efektivitas dukungan bagi UMKM, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, di mana regulasi yang rumit, kurangnya informasi, serta keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menjadi kendala utama. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan akses informasi, serta pendampingan berkelanjutan dalam aspek keuangan, pemasaran, dan teknologi. Dengan demikian, dukungan kebijakan tidak hanya sekadar tersedia, tetapi juga lebih inklusif dan efektif dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara nyata.

Kurangnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan manajemen menekankan terhadap keterbatasan dalam aspek yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan usaha dan daya saing UMKM. Hal ini terlihat dari wawasan dan penerapan manajemen yang masih konvensional, yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan

pengalaman usaha yang terbatas. Pengembangan SDM menyatakan peningkatan keterampilan dan manajemen yang baik merupakan faktor kunci dalam pemberdayaan ekonomi, terutama bagi UMKM yang membutuhkan adaptasi terhadap dinamika pasar. Untuk mengatasi keterbatasan ini, maka dilakukan berbagai pelatihan seperti *upgrading* pasar dan pemasaran, yang terbukti meningkatkan keberlanjutan usaha dan eksistensi UMKM. Namun, agar pembinaan lebih efektif maka diperlukan pendamping yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang UMKM yang didampingi.

Dari data penelitian ini, dapat dianalisis bahwa strategi kolaborasi dengan pihak eksternal merupakan pendekatan yang efektif dalam mengatasi kendala pemberdayaan UMKM, terutama dalam aspek keahlian yang belum dimiliki oleh LMI Ponorogo. Dalam teori pemberdayaan, keterlibatan aktor eksternal yang memiliki kompetensi khusus dapat meningkatkan efektivitas program, karena keahlian dan pengalaman yang lebih mendalam dapat memberikan solusi yang lebih tepat bagi pelaku UMKM.

Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perekonomian umat yang dapat dilakukan oleh LMI Ponorogo, yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak yang bersangkutan, misalnya produsen pupuk dalam program pertanian produktif menunjukkan bahwa LMI Ponorogo memahami pentingnya spesialisasi dalam pendampingan. Hal ini mencerminkan prinsip dalam manajemen strategis, di mana organisasi yang memiliki keterbatasan sumber daya internal dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan pihak yang lebih kompeten. Selain itu, model ini juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi dalam manajemen pemberdayaan, di mana LMI Ponorogo tidak memaksakan peran sebagai satu-satunya pendamping, melainkan membangun jaringan dengan ahli yang lebih relevan.

Namun, terdapat tantangan yang mungkin muncul dari strategi ini adalah bagaimana memastikan sinergi yang baik antara LMI Ponorogo, pendamping eksternal, dan pelaku UMKM agar program berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar berdampak positif bagi UMKM yang didampingi. Sedangkan, dampak pemberdayaan UMKM dapat dilihat berdasarkan indikator keberhasilan pemberdayaan antara lain penurunan jumlah masyarakat miskin, pertumbuhan pendapatan usaha yang meningkat, peningkatan kepedulian masyarakat terhadap program kesejahteraan keluarga, meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat melalui produktifitas usaha penguatan modal serta komunikasi yang baik antar kelompok, dan pemerataan pendapat yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga (Chusniah, 2023).

Penurunan jumlah masyarakat miskin dapat dikaitkan dengan penelitian ini melalui beberapa pendekatan, seperti pembangunan ekonomi, modal sosial, dan *Sustainable Development Goals (SDGs).* Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LMI Ponorogo mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menghasilkan produk unggulan daerah, sehingga berdampak pada penguatan ekonomi lokal. Selain itu, modal sosial dalam program ini dapat membangun jaringan sosial,

kepercayaan, dan kerja sama melalui pendampingan serta pelatihan yang mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Pemberdayaan UMKM termasuk dalam *SDGs* yang berkontribusi pada *SDGs* Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). LMI Ponorogo dalam melakukan pemberdayaan UMKM hanya menghasilkan persentase pengurangan kemiskinan yang relatif kecil, tetapi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan tetap menjadi indikator positif bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Namun, untuk memastikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan, strategi seperti peningkatan akses pasar dan optimalisasi pendampingan menjadi faktor utama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya membantu meningkatkan perekonomian umat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengurangan kemiskinan secara bertahap.

Pertumbuhan pendapatan usaha yang meningkat dapat dikaitkan dengan penelitian ini melalui program pemberdayaan LMI Ponorogo berupa modal, pelatihan, dan pendampingan guna meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Faktor utama dalam pertumbuhan usaha, sebagaimana terlihat dari peningkatan omzet dan perluasan pasar peserta program, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam manajemen usaha dan akses pasar. Sementara itu, keunggulan kompetitif menjelaskan bahwa UMKM dapat bertahan dan berkembang melalui strategi yang memperkuat daya saing, dalam program ini dilakukan dengan pendekatan pendampingan, pelatihan, digitalisasi pemasaran, serta sertifikasi produk untuk meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan usaha melalui program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada bantuan modal, tetapi juga pada strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi bisnis, serta optimalisasi pemasaran dan daya saing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap program dapat dikaitkan dengan penelitian ini melalui partisipasi masyarakat, motivasi sosial, dan pembelajaran sosial. Partisipasi masyarakat menekankan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam suatu program sangat mempengaruhi keberhasilannya. Dalam program pemberdayaan di LMI Ponorogo, keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program serta pendampingan kelompok telah menjadi strategi utama untuk meningkatkan partisipasi, meskipun belum ada sosialisasi khusus yang lebih luas. Selain itu, motivasi sosial menjelaskan bahwa individu lebih cenderung berpartisipasi ketika mereka melihat manfaat nyata dan memiliki dorongan intrinsik atau ekstrinsik.

Pembelajaran sosial menegaskan bahwa individu belajar melalui observasi dan pengalaman orang lain, sehingga keberhasilan peserta dapat menjadi contoh untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam program tersebut. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi masyarakat, terutama ketika menghadapi kegagalan atau keterbatasan modal, serta kendala seperti keterbatasan skill, modal, alat, dan wawasan

pasar. Di sisi lain, keahlian bawaan yang dimiliki sebagian besar pelaku UMKM menjadi faktor pendukung yang dapat dioptimalkan melalui pendampingan dan pelatihan yang lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepedulian masyarakat terhadap program tidak hanya bergantung pada partisipasi langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi, pembelajaran dari keberhasilan peserta sebelumnya, serta strategi pendampingan yang berkelanjutan untuk mengatasi hambatan partisipasi.

Meningkatkan kemandirian kelompok masyarakat melalui produktivitas usaha, penguatan modal, dan komunikasi yang baik antar kelompok dapat dikaitkan dengan kemandirian ekonomi, modal sosial, dan pembelajaran organisasi. Kemandirian ekonomi menyatakan kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas usaha dan penguatan modal, sebagaimana yang diterapkan dalam program pemberdayaan LMI Ponorogo melalui bantuan finansial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Modal sosial menekankan pentingnya hubungan sosial dalam meningkatkan kerja sama dan berbagi sumber daya di antara kelompok usaha, namun penelitian ini menemukan bahwa belum ada sistem pendampingan khusus untuk komunikasi antar kelompok usaha binaan, yang dapat menghambat kolaborasi dan pertukaran pengalaman.

Pembelajaran organisasi dengan kemandirian kelompok dapat diperkuat melalui evaluasi berkala guna mengidentifikasi tantangan dan perbaikan strategi pemberdayaan, yang telah diterapkan oleh LMI Ponorogo untuk memastikan penerima manfaat mampu mengelola usaha mereka secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian masyarakat dalam produktivitas usaha dan penguatan modal akan lebih optimal jika didukung oleh sistem komunikasi yang baik antar kelompok usaha, serta strategi pendampingan berkelanjutan, pelatihan kewirausahaan, pemasaran digital, inovasi produk, dan evaluasi berkala untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerataan pendapatan yang tercermin dari terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga dapat dikaitkan dengan distribusi pendapatan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial. Distribusi pendapatan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan, sehingga diperlukan intervensi untuk memastikan kelompok miskin merasakan manfaat ekonomi secara adil, sebagaimana dilakukan dalam program pemberdayaan LMI Ponorogo yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat meskipun pemerataan pendapatan masih sulit diukur karena *assessment* hanya dilakukan pada kelompok terdaftar.

Kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan mencukupi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan pengeluaran rumah tangga, yang tercermin dalam evaluasi program LMI Ponorogo melalui survei kaji dampak pada aspek pendidikan, pengeluaran, dan spiritual penerima manfaat. Sementara itu, keadilan sosial menunjukkan distribusi sumber daya harus menguntungkan kelompok masyarakat yang paling lemah, dalam program ini diwujudkan melalui *assessment* ketat berdasarkan kondisi ekonomi, sosial, dan potensi usaha serta melibatkan tokoh masyarakat dalam proses seleksi agar bantuan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan program pemberdayaan telah meningkatkan

pendapatan masyarakat, pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan lebih luas, seperti *assessment* yang lebih komprehensif dan evaluasi dampak yang berkelanjutan guna memastikan kesejahteraan penerima manfaat tercapai secara merata.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan UMKM di LMI Ponorogo berupa modal usaha, selain itu LMI Ponorogo juga mengadakan pelatihan penggunaan media sosial untuk memasarkan produk, pelatihan dalam *packaging*, dan membantu pembuatan sertifikat halal, PIRT, uji coba kadaluwarsa. Pemberdayaan UMKM binaan LMI Ponorogo menghadapi kendala terbatasnya SDM yang dimiliki LMI Ponorogo, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan kegiatan UMKM. Sedangkan, kendala yang dihadapi pelaku UMKM, yaitu keterampilan, permodalan, pemasaran, dan teknologi. Maka solusi yang dilakukan LMI Ponorogo, yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal yang bersangkutan sesuai dengan keahlian masing-masing. Pemberdayaan UMKM di LMI Ponorogo mendukung peningkatan ekonomi umat dan pengurangan kemiskinan sesuai tujuan *SDGs*. Pemberdayaan UMKM di LMI Ponorogo telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan usaha, meskipun masih menghadapi tantangan terhadap akses pasar dan penggunaan teknologi untuk memasarkan produk.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2024). *Profil Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo Maret 2024* - Diakses pada 13 Februari 2025. Tersedia pada laman: https://ponorogokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/05/69/profil-kemiskinan-di-kabupaten-ponorogo-maret-2024.html

Bustami. (2015). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Perspektif Ekonomi Islam)*. Penerbit A-Empat.

Chusniah, D. N. A. (2023). *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Penerbit Adab.

Hertina, D., Pongoh, H. A., Zalogo, E. F., Mulyana, H., Agustin, D., Hariyono, Kusumastuti, S. Y., Rahmawati, R., Fawaid, A., Warae, Y., & Rifni, M. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Kreatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rois, A. K. (2024). *Peran Sumber Daya Insani (SDI) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Lembaga Manajemen Infaq Ponorogo (LMI)*. *9*(4).

Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Kecana.

Setiawan, A., Asmara, D., Zulwisli, Budayawan, K., Yulastri, A., & Ganefri. (2022). *Kewirausahaan Dalam Perspektif Bisnis*. Deepublish Digital.

Subakti, Wiwit Imam. (2025). Wawancara Langsung. 11 Februari 2025.

Sukesi, K. (2015). *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press.